Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 7490-7498
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pengangguran dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Monika Caramoy sitorus[1], Olivia Damayanti Marpaung[2], Renaldi Enriko Sigalingging[3], Pany Iglesia M Simamora[4], Nela Permatasi Sari Lubis[5], Muhammad Alhasymi Matondang[6]
[1-6]Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan
monikasitorus51@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengangguran dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk deret waktu (time series) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. Variabel yang digunakan meliputi jumlah penduduk miskin sebagai variabel dependen, serta pengangguran dan Upah Minimum Provinsi sebagai variabel independen. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0,6336 (> 0,05). Sementara itu, Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0002 (< 0,05).Secara simultan, pengangguran dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan yang ditunjukkan oleh nilai F-statistic sebesar 15,64310 dengan probabilitas sebesar 0,000454 (< 0,05). Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,7277 menunjukkan bahwa 72,77% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pengangguran dan Upah Minimum Provinsi, sedangkan sisanya sebesar 27,23% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum memiliki peran penting dalam menurunkan kemiskinan, sedangkan upaya pengurangan pengangguran perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan masyarakat agar mampu memberikan dampak yang lebih efektif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: *Multiple Linear Regression, Provincial Minimum Wage, Poverty, Unemployment.*

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Menurut (Lewis, 1954), kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya kesempatan kerja yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu memperoleh pendapatan yang memadai. Selain itu, (Myrdal, 1957) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan melalui proses circular cumulative causation, yaitu kondisi ketika keterbelakangan ekonomi terus memperkuat dirinya sendiri sehingga sulit diputus tanpa adanya intervensi kebijakan yang tepat.

Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan berbagai sumber daya ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional maupun daerah. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2024), kemiskinan masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius karena masih terdapat masyarakat yang belum mampu menikmati hasil pembangunan secara merata.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan memiliki peran strategis dalam perekonomian Pulau Sumatera. Meskipun demikian, permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin (JPM) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi meskipun secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin tercatat

sebesar 1.477,10 ribu jiwa, kemudian menurun menjadi 1.360,60 ribu jiwa pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 1.463,66 ribu jiwa dan relatif bertahan di atas 1,4 juta jiwa hingga tahun 2017. Setelah itu, jumlah penduduk miskin kembali menurun hingga mencapai 1.223,01 ribu jiwa pada tahun 2024. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Sumatera Utara masih dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi yang perlu dikaji lebih lanjut.

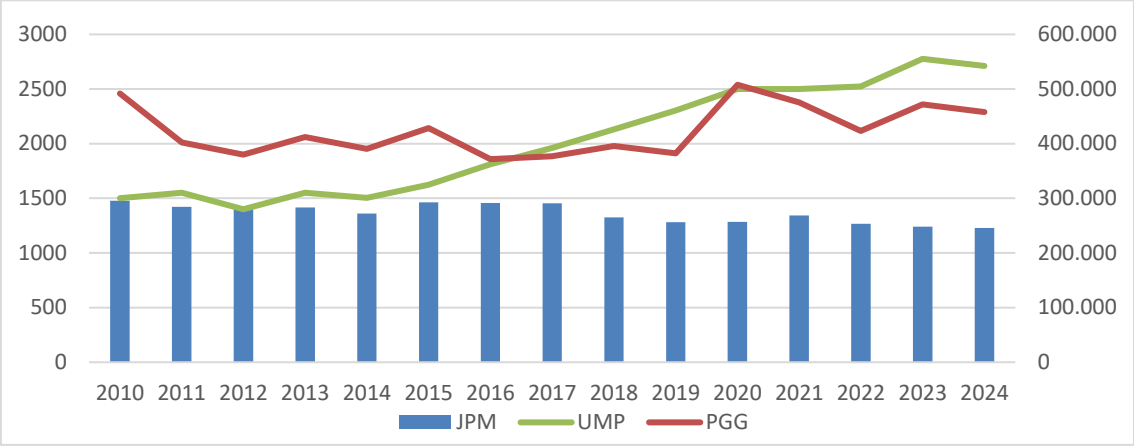

Gambar 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Pengangguran, dan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2024

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pola pergerakan yang berbeda sepanjang periode pengamatan. Jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan dalam jangka panjang, namun masih mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Di sisi lain, jumlah pengangguran menunjukkan pergerakan yang relatif tidak stabil. Pada tahun 2010 jumlah pengangguran tercatat sebesar 491.806 orang, kemudian menurun menjadi 379.980 orang pada tahun 2012. Namun pada tahun 2020 jumlah pengangguran meningkat tajam hingga mencapai 507.805 orang akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi dan berkurangnya kesempatan kerja. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan dari 1.282,04 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi sekitar 1.343,86 ribu jiwa pada tahun 2021. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya hubungan antara peningkatan pengangguran dan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Sementara itu, UMP di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 UMP tercatat sebesar Rp1.500.000 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp2.710.493 pada tahun 2024. Secara teoritis, peningkatan upah minimum diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan daya beli. Namun demikian, pada beberapa periode peningkatan UMP tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan secara langsung. Misalnya, pada periode 2015–2017 UMP terus meningkat, tetapi jumlah penduduk miskin masih berada pada tingkat yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara upah minimum dan kemiskinan tidak selalu berjalan secara sederhana dan masih memerlukan pembuktian empiris.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Menurut (Sukirno, 2015), pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memperoleh pekerjaan meskipun sedang aktif mencari pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran menyebabkan hilangnya sumber pendapatan sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan hal tersebut, (Putrizain et al., n.d.) menyatakan bahwa individu yang menganggur memiliki risiko yang lebih besar untuk hidup dalam kemiskinan karena tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain pengangguran, upah minimum juga merupakan faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan. Menurut (Mankiw, 2018), peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan kemampuan konsumsi dan kesejahteraan rumah tangga. Dengan adanya kebijakan upah minimum yang lebih tinggi, pekerja diharapkan memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga risiko kemiskinan dapat berkurang. Menurut (Mankiw, 2018) , peningkatan pendapatan yang diterima pekerja akan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum yang lebih tinggi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9894
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ternyata selain permasalahan kesenjangan data dengan arah teori, ada permasalahan pendukung lainnya, yakni *gap research* antara pengangguran dengan kemiskinan, upah minimum dengan kemiskinan. Berdasarkan hasil temuan terdahulu penelitian yang telah dilakukan, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan menurut, (Wiguna, 2013) (Munarni, 2024) (Andykha & handayani, Herniwati Retno Woyanti, 2018) Sedangkan menurut (Devanantyo, 2021) pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa. Sedangkan, menurut (Putri & Putri, 2021) tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan namun tidak signifikan.

Berdasarkan *gap research* antara Upah Minimum terhadap kemiskinan. upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. (Fajriansyah, 2022) (Munarni, 2024). Sedangkan menurut (Putri & Putri, 2021) upah minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia. pengaruh pengangguran dan upah minimum terhadap kemiskinan.(Kamil et al., 2025) menemukan bahwa pengangguran tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Sedangakan penelitian oleh (Akbar et al., 2022)

Berdasarkan fenomena empiris, landasan teori, dan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengangguran dan Upah Minimum Provinsi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara periode 2010–2024. Penelitian ini menggunakan jumlah penduduk miskin (JPM) sebagai proksi kemiskinan sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pengangguran, upah minimum, dan kemiskinan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pengupahan yang lebih efektif guna mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh pengangguran dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pengujian hipotesis melalui pengukuran variabel dengan data numerik yang dianalisis menggunakan metode statistik. Menurut (Sugiyono, 2017),penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk deret waktu (time series) tahunan selama periode 2010–2024 dengan jumlah observasi sebanyak 15 tahun. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. Variabel yang digunakan meliputi jumlah penduduk miskin sebagai variabel dependen, serta pengangguran dan Upah Minimum Provinsi sebagai variabel independen.

Jumlah penduduk miskin diukur berdasarkan jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS dan dinyatakan dalam satuan ribu jiwa. Pengangguran didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, yang dinyatakan dalam satuan jiwa. Sementara itu, Upah Minimum Provinsi merupakan standar upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara setiap tahun sebagai jaring pengaman bagi pekerja dan dinyatakan dalam satuan ribu rupiah.Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda (Multiple Linear Regression) dengan bantuan perangkat lunak EViews. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pengangguran dan Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{JPM = \alpha + \beta_1 PGG + \beta_2 UMP + \varepsilon}$$

di mana:

JPM = jumlah penduduk miskin,

A = konstanta,

β_1 dan β_2 = koefisien regresi,

PGG = pengangguran,

UMP = Upah Minimum Provinsi,

E = error term.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9894
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Sebelum dilakukan estimasi regresi, model terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Uji normalitas dilakukan menggunakan Jarque-Bera Test untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) guna mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antarvariabel independen. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan White Test untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians residual. Selain itu, karena penelitian menggunakan data time series, uji autokorelasi dilakukan menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test untuk mendeteksi adanya korelasi residual antarperiode pengamatan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan uji koefisien determinasi (Adjusted R^2). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sementara itu, Adjusted R^2 digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$).

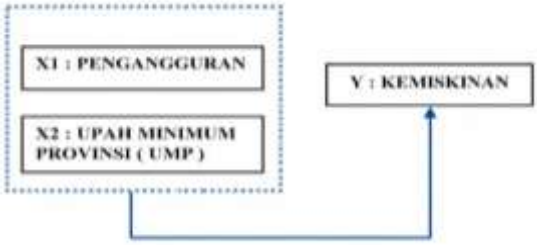

Gambar 2 Kerangka Berpikir

3. Hasil dan Diskusi

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data time series Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010-2024 yang terdiri atas variabel jumlah penduduk miskin (JPM), pengangguran (PGG), dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara menunjukkan tren yang cenderung menurun dari 1.477,1 ribu jiwa pada tahun 2010 menjadi 1.228,01 ribu jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat pengangguran mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Upah Minimum Provinsi menunjukkan tren meningkat hampir setiap tahun, dari Rp1.500.000 pada tahun 2010 menjadi Rp2.710.493 pada tahun 2024.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: JPM
Method: Least Squares
Date: 05/25/26 Time: 23:12
Sample: 2010 2024
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1607.141	123.8019	12.98155	0.0000
PGG	0.000160	0.000327	0.489061	0.6336
UMP	-0.155128	0.030065	-5.159678	0.0002

R-squared	0.722775	Mean dependent var	1361.301
Adjusted R-squared	0.676571	S.D. dependent var	86.52357
S.E. of regression	49.20664	Akaike info criterion	10.80679
Sum squared resid	29055.52	Schwarz criterion	10.94840
Log likelihood	-78.05093	Hannan-Quinn criter.	10.80528
F-statistic	15.64310	Durbin-Watson stat	1.458843
Prob(F-statistic)	0.000454		

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki nilai t-hitung sebesar 0,489061 yang lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1,77093. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9894
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Sebaliknya, variabel Upah Minimum Provinsi memiliki nilai t-hitung sebesar 5,159678 yang lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,77093, sehingga dapat disimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Secara simultan, pengangguran dan Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F-hitung sebesar 15,64310 yang lebih besar daripada F-tabel sebesar 3,81. Dengan demikian, kedua variabel secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

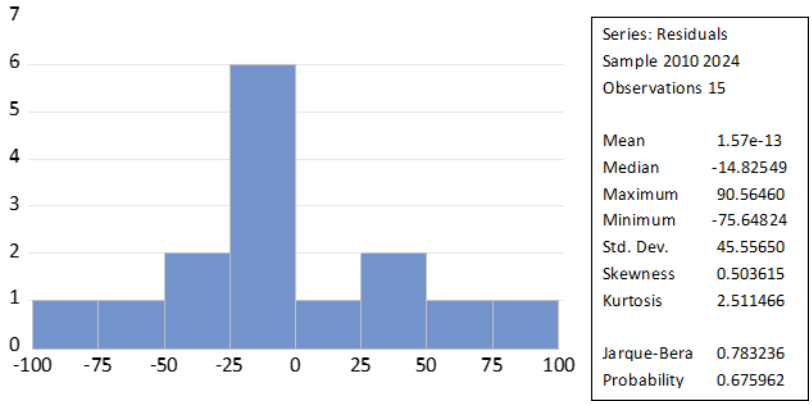

Hasil uji normalitas menggunakan Jarque-Bera menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,795547 yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual model berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.671958	Prob. F(2,10)	0.5323
Obs*R-squared	1.777053	Prob. Chi-Square(2)	0.4113

Uji autokorelasi menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,4113 yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi dalam model.

Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 05/25/26 Time: 23:14
Sample: 2010 2024
Included observations: 15

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	15326.92	94.95079	NA
PGG	1.07E-07	121.0666	1.276295
UMP	0.000904	24.19727	1.276295

Selanjutnya, uji multikolinearitas menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,276295 atau lebih kecil dari 10, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9894
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.981774	Prob. F(2,12)	0.1804
Obs*R-squared	3.724311	Prob. Chi-Square(2)	0.1553
Scaled explained SS	1.801334	Prob. Chi-Square(2)	0.4063

Uji heteroskedastisitas menggunakan Breusch-Pagan-Godfrey juga menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,4567 yang lebih besar dari 0,05, sehingga model tidak mengalami heteroskedastisitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.Koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,7227 mengindikasikan bahwa sebesar 72,27% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pengangguran dan Upah Minimum Provinsi. Sisanya sebesar 27,73% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pengangguran Terhadap kemiskinan

Hasil uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,6336 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan tidak dapat diterima secara statistik pada taraf kepercayaan 95 persen. Arah koefisien yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan pengangguran cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Akan tetapi, karena nilai signifikansinya berada di atas batas yang ditetapkan, hubungan tersebut belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa perubahan pengangguran secara nyata memengaruhi tingkat kemiskinan selama periode penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa pengangguran bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan perubahan tingkat kemiskinan.

Secara teoritis, pengangguran merupakan salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan kemiskinan. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau tidak memperoleh kesempatan kerja, maka kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi berkurang sehingga daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup juga menurun. Kondisi ini sejalan dengan teori lingkaran kemiskinan yang menjelaskan bahwa rendahnya kesempatan kerja dapat menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya memperbesar risiko kemiskinan (Situmorang & Suharianto, 2024). Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengangguran tidak selalu diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk miskin secara langsung. Hal tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang mampu mengurangi dampak negatif pengangguran terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (A, n.d.), (Devanantyo, 2021), (Munarni, 2024), dan (Andykha & handayani, Herniwati Retno Woyanti, 2018) yang menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengangguran dapat secara nyata memperbesar jumlah penduduk miskin karena hilangnya sumber pendapatan utama rumah tangga. Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Devanantyo, 2021) dan (Putri & Putri, 2021) yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik wilayah, kondisi pasar tenaga kerja, struktur ekonomi daerah, serta keberadaan program perlindungan sosial yang berbeda pada masing-masing lokasi dan periode penelitian.

Menurut (Ujung et al., 2022), tidak semua individu yang menganggur berada dalam kategori miskin. Sebagian penganggur masih memiliki sumber pendapatan lain, dukungan keluarga, aset produktif, maupun tabungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, terdapat pula pengangguran yang berasal dari kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan relatif baik, seperti lulusan baru yang sedang mencari pekerjaan atau individu yang secara sukarela belum bekerja. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran tidak selalu diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Dengan demikian, meskipun pengangguran memiliki kecenderungan meningkatkan kemiskinan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan, sehingga tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar variabel pengangguran, seperti pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, distribusi pendapatan, dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9894
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan

Hasil uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Arah koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, signifikansi statistik yang diperoleh menunjukkan bahwa pengaruh tersebut terjadi secara nyata sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan dapat diterima. Temuan ini memberikan gambaran bahwa kebijakan peningkatan upah minimum memiliki kontribusi dalam menekan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan pendapatan tenaga kerja. Dengan demikian, upah minimum menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam memengaruhi tingkat kemiskinan.

Secara teoritis, upah minimum merupakan standar upah yang ditetapkan pemerintah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Menurut Bruce E. Kaufman dan Julie L. Hotchkiss (2006), tujuan utama penetapan upah minimum adalah meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan produktivitas pekerja melalui pemenuhan standar hidup minimum (Situmorang et al., 2025). Ketika upah yang diterima pekerja meningkat, kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan juga akan meningkat. Kondisi tersebut dapat mengurangi kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan karena masyarakat memiliki daya beli yang lebih baik dan akses yang lebih luas terhadap berbagai kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, peningkatan upah minimum secara teoritis diharapkan mampu menjadi instrumen untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saman Fajriansyah dan Ika Chandriyanti yang menemukan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Temuan serupa juga diperoleh oleh (Munarni, 2024) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang rentan terhadap kemiskinan. Dengan meningkatnya pendapatan, kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi lebih baik sehingga peluang untuk keluar dari kondisi kemiskinan juga semakin besar. Oleh karena itu, kebijakan penetapan upah minimum dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Putri & Putri, 2021)yang menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian tersebut berpendapat bahwa kenaikan upah minimum belum tentu mampu menurunkan kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Kenaikan upah yang tidak diikuti oleh stabilitas harga dapat menyebabkan daya beli masyarakat tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena sebagian tambahan pendapatan digunakan untuk menutupi kenaikan biaya hidup. Oleh sebab itu, efektivitas kebijakan upah minimum dalam mengurangi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro yang mendukung (Sugiyono, 2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan upah minimum berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, namun keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti inflasi, biaya hidup, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Pengaruh Pengangguran dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel pengangguran dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai F-statistic sebesar 15,64310 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000454 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pengangguran dan UMP secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan dapat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara kolektif memiliki kemampuan dalam menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan selama periode penelitian. Meskipun pengaruh masing-masing variabel berbeda ketika diuji secara parsial, secara keseluruhan keduanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dinamika kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Secara teoritis, pengangguran dan upah minimum merupakan dua variabel ekonomi yang memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan. Pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan karena individu yang tidak bekerja kehilangan sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebaliknya, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja sehingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar menjadi lebih baik. Menurut (Mankiw, 2018), kesempatan kerja yang lebih luas dan tingkat upah yang memadai merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9894
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kemiskinan. Oleh karena itu, perubahan pada kedua variabel tersebut secara bersamaan berpotensi memengaruhi kondisi kemiskinan suatu daerah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun secara parsial pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, ketika dianalisis bersama dengan UMP, kedua variabel mampu menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan secara signifikan. Hal ini tercermin dari nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,7227 yang menunjukkan bahwa sebesar 72,27% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pengangguran dan UMP dalam model penelitian. Sementara itu, sisanya sebesar 27,73% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinasi yang relatif tinggi tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Munarni, 2024) yang menyatakan bahwa pengangguran dan upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, temuan ini juga mendukung teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh (Smith, 2012) yang menjelaskan bahwa pengurangan kemiskinan dapat dicapai melalui peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih luas, masyarakat memiliki peluang memperoleh penghasilan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Di sisi lain, kebijakan upah minimum yang memadai dapat memperkuat daya beli dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan melalui kebijakan yang terintegrasi, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang memadai sehingga dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dapat lebih optimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh pengangguran dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010–2024, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: Variabel pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara bersama-sama, pengangguran dan Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Referensi

1. A, N. M. M. A. (n.d.). PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BALI. *E-Jurnal EP Unud*, 384–392.
2. Akbar, A., Primandari, N. R., & Muhariah, A. (2022). *ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2020*. *10*(02), 80–91. https://doi.org/10.33019/equity.v
3. Andykha, R., & handayani, Herniwati Retno Woyanti, N. (2018). ANALISIS PENGARUH PDRB, TINGKAT PENGANGGURAN, DAN IPM TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, *33*(2), 113–123.
4. Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Kemiskinan Makro Indonesia September 2024 dan IPM 2024*. https://www.bps.go.id
5. Devanantyo, N. U. (2021). *PENDIDIKAN , DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR*.
6. Fajriansyah, S. C. ika. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *5*(2), 558–570.
7. Kamil, A., Alwi, M., & Hidayat, A. A. (2025). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi NTB Ahmad. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, *3*(02), 123–132.
8. Lewis, A. w. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. *The Manchester School*, *22*(2), 139–191. https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x
9. Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning.
10. Munarni, V. (2024). PENGARUH UPAH MINIMUM DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. *Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, *9*(2012), 301–312.
11. Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Under-Developed Regions*. Duckworth.
12. Oktania, A., Silfani, D., Sitohang, G. S., Situmorang, F., & Akbar, M. A. (2024). ANTARA KEMISKINAN DAN PENINGKATAN IPM TAHUN 2011-2023 DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *17*(2).
13. Putri, E. millenia, & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, *10*(November), 106–114.
14. Putrizain, S. S., Saefullah, A., Muriany, E., Agustina, A., Muksin, M., & Rahmi, C. (n.d.). *TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN*. *05*(01), 70–83.
15. Situmorang, F., & Suharianto, J. (2024). Eksplorasi Jejak Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk Miskin, Dan Upah Minimum Regional Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sumatera Utara 2002-2022. *Journal of Economics and Regional Science*, *4*(2), 98–114. https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-esensi/article/view/467
16. Situmorang, F., Syahbana, E., Alisya, J., & Olivia, A. R. (2025). Pengaruh Investasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Dengan Produk Domestik Regional Bruto Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Economics and Regional Science*, *5*(2), 127–141.
17. Smith, M. P. T. S. C. (2012). *Economic Development* (11 (ed.)). Pearson.
18. Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D*. Alfabeta.
19. Sukirno. (2015). *Makroekonomi teori pengantar (Edisi ketiga)*. Rajawali Pers.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9894
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

20. Ujung, M. S. B., Simatupang, R., Butar-Butar, J., Manurung, R., & Sagara, P. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2000–2020. *Journal of Economic and Business*, *3*(1). https://doi.org/10.36655/jeb.v3i1.634
21. Wiguna, V. I. (2013). *ANALISIS PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005-2010*.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9894
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)